RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Jumlah Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2020 – 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N (2020)	Capaian Kinerja Tahun N (2021)	Satuan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	85.41	85.71	-
2	Angka Kemiskinan	6.90	7.61	Persen
3	Angka Pengangguran	9.54	8.94	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3.29	5.53	Persen
5	Pendapatan Perkapita	2.009.893,-	2.397.300,-	Rupiah/bulan /perkapita
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.3034	0.3469	-

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021, BPS Kota Banda Aceh

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

a. Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, dengan jumlah APBK sebesar Rp. 77.515.290.552,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.470.542.624,- atau 62,53%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program sebagai berikut: Pengelolaan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengendalian Perizinan Pendidikan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.

b. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan BLUD RSU Meuraxa Kota Banda Aceh, dengan

jumlah APBK sebesar Rp.570.904.400,- dan APBN sebesar Rp.1.461.008.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 902.559.350,- atau 44,42%.

Anggaran tersebut adalah untuk membiayai program sebagai berikut: Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Penyakit tidak menular, Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

c. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dengan pagu sebesar Rp. 25.760.869.700,- dan terealisasi sebesar Rp.21.741.564.336,- atau 84,40%. Anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021, secara umum dialokasikan untuk program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dengan jumlah APBK sebesar Rp.437.500.000,- dan realisasi Rp.0,-. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya/tidak adanya kegiatan pada wilayah yang terjadi Bencana Alam di Tahun 2021, maka pelaksanaan kegiatan ini tidak dilakukan.

e. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan APBK sebesar Rp. 4.384.341.588,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.294.185.219,- atau 98%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program sebagai berikut: Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial Dasar, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan program Penanganan Bencana.

f. Ketentraman dan Ketertiban

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dengan pagu yang bersumber dari APBK Tahun 2021 sebesar Rp.379.561.502.223,- dan terealisasi sebesar Rp.370.393.803.551,- atau 97,59%.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis bencana), Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan perangkingan dikarenakan hasil evaluasi secara gabungan untuk masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh belum disampaikan oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri Seksi Wilayah I. Pengukuran kinerja pemerintahan Kabupaten dan Kota oleh Tim Daerah Pemerintah Aceh EPPD dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil EPPD, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam capaian kinerja dan penyediaan datanya sudah dikategorikan baik, namun demikian terdapat beberapa capaian Indikator Kinerja Kunci yang masih rendah, antara lain sebagai berikut:

1) IKK Makro:

- Peningkatan laju angka pengangguran menjadi 9,54 persen;
- Terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi -3,29%;
- Terjadi penurunan pendapatan per kapita dengan laju sebesar -1,78%;
- Meningkatnya ketimpangan pendapatan sebesar 4,84%;

2) **Urusan Wajib pada Urusan Pendidikan:**
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebesar 33,76%;

3) **Urusan Wajib pada Urusan Kesehatan:**
- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar masih rendah yaitu sebesar 23,05%;
- Rendahnya persentase orang dengan resiko terinfesi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar yaitu sebesar 33,48%.

4) **Urusan Ketenagakerjaan:**
- Belum tersedianya data terkait tenaga kerja konstruksi yang valid;
- Tidak tersedianya data tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi;
- Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak hanya sebesar 1,08%;

5) **Urusan Perumahan:**
- Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani hanya sebesar 5,77%;

6) **Urusan Sosial:**
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sangat rendah yaitu sebesar 0,17%;

7) **Urusan Pertanahan:**
Tidak tersedianya data terkait izin pertanahan;

8) **Urusan Lingkungan Hidup:**
Tidak diselenggarakannya pengukuran IKLH di Kota Banda Aceh

9) **Urusan Admindukcapil:**
- Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA sebesar 66,99%
- Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 27,27%;

10) **Urusan Kominfo:**
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo masih rendah yaitu 2,27%

11) **Urusan Koperasi dan UKM:**
Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT hanya 7,30%

12) **Urusan Penanaman Modal:**
Pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh menurun jika dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -54,23%

13) **Urusan Kepemudaan dan Olahraga:**
- Jumlah pemuda yang berwirausaha masih rendah yaitu sebesar 7,02%
- Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu sebesar 1,16%.

14) **Urusan Kearsipan:**
Belum lengkapnya data terkait kearsipan

15) **Urusan Pariwisata:**
- Pertumbuhan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara menurun jika dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -87,89% dan -64,59%;
- Masih rendahnya tingkat hunian akomodasi yaitu sebesar 7,34%.

16) **Urusan Penunjang:**
Persentase PNS diluar guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional hanya sebesar 5,41%.

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 (lima) Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPK Kota Banda Aceh

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh telah menetapkan besarnya pendapatan daerah untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.324.514.182.725,- dengan realisasi pencapaian sebesar Rp1.209.637.528.685,66 atau 91,33%. Komposisi sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Banda Aceh terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar Rp974.058.625.172,00 atau 73,54% dari total pendapatan daerah. Disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.327.189.757.553 atau 24,70% dari total pendapatan daerah dan yang terkecil adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar Rp23.265.800.000 atau 1.76 % dari total pendapatan daerah.

5. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN, REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Belanja Daerah terdiri dari 1) Belanja Operasi, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer.

Bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021, Total Belanja Daerah adalah Rp1.332.172.790.386,- dengan realisasi sebesar Rp1.207.549.543.958,10 atau 90,65%. Alokasi Belanja Operasi adalah Rp965.675.201.051 dengan realisasi Rp890.260.557.706,82, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp220.754.267.845,- terealisasi Rp186.423.918.086,28, Belanja Tidak terduga dengan pagu anggaran Rp3.221.350.364,- terealisasi sebesar Rp2.223.104.729,-. Sedangkan alokasi Belanja Transfer Rp142.521.971.126,- terealisasi sebesar Rp128.641.963.436,-

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp18.664.186.562,- yang terdiri dari Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp19.349.907.594,46. Besarnya realisasi SILPA tahun sebelumnya diakibatkan tidak adanya anggaran perubahan tahun 2021 sedangkan penyusunan RAPBD 2021 disahkan sebelum berakhirnya anggaran tahun 2020. Selain itu penerimaan pembiayaan dianggarkan pada Penerimaan

Pinjaman Daerah sebesar Rp8.664.186.562,- dan tidak terdapat realisasi anggarannya.

Untuk pengeluaran pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang jatuh tempo dari anggaran Rp.11.005.578.901,- terealisasi sebesar Rp10.925.769.376,- . Sehingga SILPA tahun 2021 adalah sebesar Rp.10.512.122.946,02,-.

6. INOVASI DAERAH

a. SiHati (Sistem Informasi Akta Kelahiran dan Kematian Online)

Pada tahun 2021 dilakukanlah perubahan pada layanan onlie dengan nama " SiHati " Online (Sistem Informasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian) dimana mitra kerja yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan masyarakat umum dapat menggunakan aplikasi ini dengan aman dan nyaman, secara langsung digunakan untuk memproses akta kelahitran di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri melalui verifikasi dan validasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh selanjutnya dilakukan TTE (Tanda Tangan elektronik) dan dikirimkan file dalam bentuk Pdf ke e-mail mitra kerja Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri selanjutnya dicetak di tempat mitra kerja dengan kertas putih HVS 80 gram ukuran kuarto.

Selanjutnya akan dikembangkan dengan pembuatan Akta Kematian di Rumah Sakit dan di Gampong-Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

b. Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi)

Merupakan suatu kolaborasi kerja sama dengan pihak Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri dalam mempercepat proses pembuatan Akta kelahiran di tempat kelahiran telah diupayakan sejak tahun 2017 hingga kini dalam suatu dokumen perjanjian kerjasama.

Disdukcapil Kota Banda Aceh berkeinginan untuk membahagiakan bunda-bunda yang melahirkan anaknya dengan sesegera mungkin mencatatkan anaknya dalam Dokumen Negara. Akta kelahiran merupakan dokumen negara sebagai pengakuan keberadaan bayi atas segala hak-haknya sebagai warga negara.

Mitra kerja percepatan pembuatan akta kelahiran merupakan suatu jaringan hasil dari inovasi yang memiliki visi dan misi yang sama terhadap pelayanan prima. Perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri telah tercatat 19 buah PKS yang telah bermitra yaitu 1. Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati; 2. Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda; 3. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh; 4. Rumah Sakit Harapan Bunda; 5. Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa; 7. Rumah Sakit Tgk.Fakinah; 8. Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Az-Zahra; 9. Klinik Bersalin New Putroe Phang; 10. Klinik Bersalin Bungong Seulanga; 11. Klinik Bersalin Cut Khairiati; 12. Klinik Umum dan Bersalin Muhammadiyah Aceh; 13. Klinik Bersalin Hartini DJ; 14. Praktik Bidan Mandiri Sabarina; 15. Praktik Bidan Mandiri Fitriani; 16. Praktik Bidan Mandiri Nuraini; 17. Praktik Bidan Mandiri Jawiriah; 18. Praktik Bidan Mandiri Erni Munir dan terakhir PKS dengan Rumah Sakit Umum Cempaka Lima.

Kesadaran dan ketulusan dalam pelayanan dimasing-masing lini pelayanan publik, mengilhami suatu inovasi yang diberinama Inovasi Pelita Hati mampu menghadirkan suatu kolaborasi untuk bermitra dalam suatu pelayanan berkesinambungan dengan menempatkan masyarakat sebagai yang mesti dilayani dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, Maret 2022

WALIKOTA BANDA ACEH,

H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM